**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang latar belakang masalah tentang fenomena global atau *issue* yang mendasari penelitian untuk melakukan penelitian ini. Dari latar belakang masalah peneliti mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi kemudian membatasi masalah-masalah tersebut yang akan diteliti lebih dalam.

Dari batasan masalah tersebut dapat dirumuskan masalah apa saja yang terjadi serta masalah yang menjadi pertanyaan peneliti untuk melakukan peelitian ini. Berikutnya peneliti akan memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

1. **Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Direktorat Jendral Pajak berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dan menurut *Badan Pusat Statistik Jakarta* dari data perkembangan wajib pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 jenis Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki jumlah wajib pajak yang paling banyak diantara jenis pajak daerah lainnya. Kita dapat melihat jumlah wajib pajak Kendaraan Bermotor paling banyak tertera pada tabel di lampiran.

Penggunaan kendaraan bermotor roda dua yang tinggi di DKI Jakarta terlihat jelas dari padatnya kendaraan bermotor roda dua yang melintasi jalanan setiap harinya. Melihat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta saat ini banyak penduduk di DKI Jakarta yang bekerja sebagai ojek *online* karena saat ini kendaraan bermotor roda dua dapat dimiliki oleh semua kalangan. Serta karena kemacetan yang terjadi di Kota Jakarta menyebabkan permintaan masyarakat akan ojek *online* meningkat. Salah satu ojek *online* yang terkenal saat ini adalah Gojek. Menurut [*www.tribunnews.com*](http://www.tribunnews.com) pada pengemudi Gojek saat ini mencapai satu juta pengemudi. Sebagian besar pengendara Gojek merupakan pemilik kendaraan bermotor roda dua yang pakainya untuk mencari penghasilan dan sudah seharusnya membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Kepemilikan itu terlihat dari salah satu syarat menjadi pengendara Gojek yaitu nama pemilik dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus sama dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun nama di STNK harus terdaftar pula di Kartu Keluarga (KK).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut *Kompas.com* pada Rabu, 19 Juli 2017 Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Menurut Hestu tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat *tax ratio* di Indonesia yang masih 10,3 persen. Menurut *Kompas.com* pada 28 Juni 2018 sebanyak 44,6 persen kendaraan belum membayar Pajak Kendaraannya, tunggakan dari Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp 1,6 Triliun. Ini menunjukan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Tingkat Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu yang dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang rendah adalah tingkat pengetahuan wajib pajak. Tingkat pengetahuan wajib pajak yang dimaksud disini adalah mengenai pembayaran, penghitungan, dan pelaporan pajak. Pengetahuan wajib pajak yang diperoleh dapat melalui pendidikan formal, pelatihan, atau sosialisasi. Secara logika semakin mengerti wajib pajak akan pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara, semakin patuh pula wajib pajak untuk melakukan kewajibannya atas pembayaran pajak, namun dalam beberapa kasus ditemukan bahwa jika pengetahuan yang wajib pajak miliki semakin baik, justru wajib pajak semakin mencari cara untuk menghindari ataupun mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Damajanti (2015) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015). Jumlah perkembangan kendaraan bermotor meningkat tetapi penerimaan pendapatan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor tidak meningkat.

Menurut *CNN Indonesia* pada 16 Januari 2018 iklim yang dapat diadopsi oleh Indonesia agar masyarakat mau membayar pajak dengan sukarela adalah meningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan infrastuktur yang memadai, kemudahan dalam dunia usaha, kesederhanaan sistem perpajakan, kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan sikap saling percaya antara Wajib Pajak dan fiskus dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk patuh secara formal maupun material dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kualitas barang dan jasa publik yang baik diharapkan tingkat kepatuhan pajak juga meningkat. Dapat disimpulkan bahwa membangun kesadaran membayar pajak berarti menciptakan iklim perpajakan yang baik. Membangun iklim perpajakan yang baik diawali dengan meningkatkan kualitas barang dan jasa publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Susanti (2013) menyatakan bahwa tingkat pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan dalam membayar pajak tepat pada waktunya serta besarnya tingkat pendapatan akan menjadi pertimbangan dalam pemungutan pajak. Jika persepsi/keyakinan wajib pajak terhadap tingkat penghasilan semakin tinggi akan menjadi pertimbangan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurut [*www.tribunnews.com*](http://www.tribunnews.com) pada bulan Februari 2018 pengemudi Gojek saat ini mencapai satu juta pengemudi. Dikarenakan jumlah pengemudi Gojek yang semakin bertambah maka saat ini objek pajak juga ikut bertambah karena pengemudi Gojek yang semakin hari semakin bertambah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta.*

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah wajib pajak mengetahui tentang fungsi pajak bagi negara?
2. Apakah wajib pajak mengetahui tentang pajak daerah ?
3. Apakah wajib pajak mengetahui tentang kepatuhan wajib pajak ?
4. Bagaimana hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak ?
5. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta ?
6. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta ?
7. Apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta ?
8. **Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta ?
3. Apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta ?
4. **Batasan Penelitian**

**Karena keterbatasan waktu, data, dan biaya maka dalam penelitian ini penulis melakukan batasan terhadap penelitian sebagai berikut**

1. **Responden merupakan pemilik kendaraan pribadi roda dua khususnya pengendara Gojek yang memiliki kendaraan sendiri dan pernah membayar pajak*.***
2. **Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018.**
3. **Penelitian yang dilakukan pada wajib pajak pengendara Gojek *online* yang berada di wilayah DKI Jakarta.**
4. **Jenis pajak yang dibahas adalah Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaran Bermotor roda dua.**

1. **Rumusan Masalah**

**Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah p**engaruh pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan tingkat pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta*.*

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.
4. **Manfaat Penelitian**
5. Pembaca

Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan baru bagi para pembaca dalam bidang pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor roda dua.

1. Peneliti Lain

Bagi peneliti lain, hasil penelitian diharapkan dapat dikembangkan dan dilengkapi serta menjadi referensi bagi penelitian mendatang terkait bidang pajak daerah, khusunya Pajak Kendaraan Bermotor roda dua.

1. Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor roda dua.